



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.4704-ORG/2025
TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Implementasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terhadap ketercapaian Kegiatan Utama dan Indikatornya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, disampaikan kepada Tim Penilai Nasional.
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
1	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	4	1. Asistensi 2. Evaluasi dan Monitoring	Dokumen	Tim Kerja	-	-	-	1	1	Rp 60.000.000	Bagian Organisasi	Ketua Tim KTL
2	Tingkat Maturitas SPIP	4	2,87	3	Persiapan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi, dengan: a. Penyusunan Kepwal Tim PM b. Penentuan Sasaran dan OPD yang akan dilakukan PK c. Submit Persiapan PK	Dokumen	Jumlah Dokumen Persiapan Penjaminan Kualitas SPIP	-	1	-	-	1	Rp 25.500.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penjaminan Kualitas	-	10	-	-	10	Rp 51.300.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					Penyusunan Laporan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Surat Permohonan Evaluasi SPIP kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi	-	1	-	-	1	Rp 15.720.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					Fasilitasi Kegiatan Tahap Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2025	Laporan	Laporan Fasilitasi Kegiatan Tahap Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2025	1	-	-	-	1	Rp 77.511.362	Tim PM	Setda (Bagian Organisasi)

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Fasilitasi Kegiatan Tahap Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2025	Laporan	Laporan Fasilitasi Kegiatan Tahap Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2025	-	1	1	1	3	Rp 237.458.802	Tim PM	Setda (Bagian Organisasi)
3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,5	0,5	4 PD	1. Melakukan Monev terhadap PD yang telah meraih predikat WBK dan WBBM pada Tahun sebelumnya.	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monev Pembangunan Zona Integritas	-	-	4	-	4	Rp 37.800.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					2. Melakukan pendampingan kepada setiap perangkat daerah yang akan diusulkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM Tahun 2026.	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dipersiapkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas	-	-	4	-	4	Rp 37.800.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
4	Nilai SAKIP	4	81,4	82,41	Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja										
					Melakukan Reviu RPD Bahan penyusunan RKPD 2025 dan 2026	Berita Acara Reviu RPD tahun 2024	Jumlah Berita Acara Reviu RPD Tahun 2024	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	386.809.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Melakukan Reviu IKU Tahun 2025	Berita Acara Reviu RPD Tahun 2025	Jumlah Berita Acara Reviu RPD Tahun 2025	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	386.809.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melakukan sosialisasi kebiasaan reviu Renstra dan IKU serta PK pada Perangkat Daerah Tahun 2025	Berita Acara Reviu IKU Tahun 2025	Jumlah Berita Acara Reviu IKU Tahun 2025	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	59.125.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melakukan sosialisasi kebiasaan reviu Renstra dan IKU serta PK pada Perangkat Daerah Tahun 2025	Berita Acara Reviu Renstra dan IKU serta PK pada Perangkat Daerah (Prioritas pada Disnaker, Disdagin, DKPP, DSDABM, Dinsos)	Jumlah Berita Acara Reviu Renstra dan IKU serta PK pada Perangkat Daerah	-	3 Laporan	-	-	3 Laporan	1.995.017.560	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melakukan Pemetaan kinerja Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 2029	Dokumentasi Pemetaan kinerja Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 2029	Jumlah Dokumentasi Pemetaan kinerja Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 2029	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	120.346.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melakukan reviu atas rencana aksi PD tematik mandatory dan inisiatif Tahun 2025	Dokumentasi keselarasan rencana aksi tematik Pemda dengan Rencana Aksi pada tingkat PD berdasarkan	Jumlah Dokumentasi keselarasan rencana aksi tematik Pemda dengan Rencana Aksi pada tingkat PD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	132.400.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
						Rencana Aksi Tematik Mandatory dan Inisiatif (Prioritas pada DKUKM dan DPMPTSP)	berdasarkan Rencana Aksi Tematik Mandatory dan Inisiatif								
					Melakukan reviu atas rencana aksi PD tematik mandatory dan inisiatif Tahun 2025	Dokumentasi Rencana Aksi Mandatory dan inisiatif Tingkat Pemda	Jumlah Dokumentasi Rencana Aksi Mandatory dan inisiatif Tingkat Pemda	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	132.400.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melakukan reviu atas rencana aksi PD tematik mandatory dan inisiatif Tahun 2025	Dokumentasi Rencana Aksi Mandatory dan inisiatif Tingkat PD dilengkapi Langkah aksi	Jumlah Dokumentasi Rencana Aksi Mandatory dan inisiatif Tingkat PD dilengkapi Langkah aksi	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	1.881.097.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala dan berjenjang	Dokumen hasil monev berkala dan berjenjang pada Seluruh PD tahun 2024 dan tahun 2025	Jumlah Dokumen hasil monev berkala dan berjenjang pada Seluruh PD tahun 2024 dan tahun 2025	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	857.574.060	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Melakukan verifikasi SK IKU Kota dan Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan Definisi Operasional yang cukup jelas dan formulasi pengukuran atas komponen pembentuk IKU	SK IKU Pemda Terverifikasi	Jumlah SK IKU Pemda Terverifikasi	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1.000.000.000	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Melakukan verifikasi SK IKU Kota dan Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan Definisi Operasional yang cukup jelas dan formulasi pengukuran atas komponen pembentuk IKU	SK IKU PD Terverifikasi	Jumlah SK IKU PD Terverifikasi	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	1.162.221.747	Seluruh Perangkat Daerah	Bapperida
					Komponen Pelaporan Kinerja										
					Persiapan Tim Penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp 376.361.350	Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
					Asistensi Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja dalam rangka verifikasi dan validasi terhadap data akhir target Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan dalam bentuk Berita Acara	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	1	-	-	-	1	Rp 31.200.000	Seluruh Perangkat Daerah	Setda (Bagian Organisasi)

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Asistensi Perangkat Daerah (unit kerja) / Penyusunan LKIP Kota dan Pengumpulan Analisis Data Capaian Kinerja IKU Kota	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp 75.000.000	Seluruh Perangkat Daerah	Setda (Bagian Organisasi)
					Pengolahan dan verifikasi data capaian kinerja, penyelarasan dan verifikasi data akhir hasil reviu APIP Inspektora	Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1	-	-	-	1	Rp 6.600.000	Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
					Komponen Evaluasi Kinerja										
					Melakukan Pendampingan Penggunaan Aplikasi SEMAKIN-PD;	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan	-	60	-	-	60	Rp 47.250.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					Melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah;	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi AKIP	-	60	-	-	60	Rp 49.000.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi	-	-	60	-	60	Rp 27.750.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
							hasil evaluasi AKIP								
5	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	77,7	78,00	Pelaksanaan Pembinaan bagi Operator Aplikasi SRIKANDI	Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai Digitalisasi Arsip	-	-	60	-	60	Rp 122.399.948	Seluruh perangkat Daerah	Disarpus
6	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	4	4	Sosialisasi LAPOR! bagi admin LAPOR! (Zoom)	Dokumen	Laporan Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi aplikasi LAPOR! bagi admin LAPOR!	1	-	-	-	1	Rp 35.100.000	Diskominfo	Bidang Diseminasi
7	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	71,5	71,50	1. Surat Edaran Wali Kota/Sekretaris Daerah terkait usulan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum 2. Menyusun daftar persyaratan permohonan pembentukan produk hukum sesuai dengan variabel penilaian IKK 3. - Melaksanakan Sosialisasi IKK dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah - Menginventarisir Produk Hukum Daerah - Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait - Mengirimkan data enumerator ke LAN - Melakukan Evaluasi pelaksanaan penilaian IKK	Nilai	Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	71,51	71,51	Rp 20.000.000	Bagian Hukum dan Perangkat Daerah Terkait	Setda (Bagian Hukum)

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
8	Indeks Reformasi Hukum	2,5	87,44	87,45	Optimalisasi pemenuhan data dukung penilaian pada masing-masing variabel penilaian IRH	Nilai	Capaian Nilai Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	87,45	87,45	Rp 15.000.000	Setda (Bagian Hukum) dan Perangkat Daerah Terkait	Setda (Bagian Hukum)
9	Indeks Pembangunan Statistik	2,5	3,04	3,04	Penyusunan Daftar Data	dokumen	Tersedianya Daftar Data 2026		-	-	1	1	Rp 1.980.000	Diskominfo	Bidang Data dan Statistik
					Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi	-	60	-	-	60	Rp 18.900.000	Diskominfo	Bidang Data dan Statistik
					Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Teridentifikasi dan terevaluasinya kegiatan statistik sektoral di perangkat daerah	-	-	5	-	5	Rp 1.650.000	Diskominfo	Bidang Data dan Statistik
					"Bimtek Analisa dan Publikasi Data"	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Analisa dan Publikasi Data"	-	60	-	-	60	Rp 7.340.000	Diskominfo	Bidang Data dan Statistik

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Penyusunan Daftar Data Tahun 2026	Dokumen	Terbentuknya Dokumen Daftar Data dan Kalender Data	-	-	1	1	2	Rp 3.960.000	Diskominfo	Bidang Data dan Statistik
					Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi Tahun 2025	Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Bandung Data Festival (MONEV dan AWARD)	-	-	-	1	1	Rp 53.200.000	Diskominfo	Bidang Data dan Statistik
10	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	82,72	83,42	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	1	1	1	1	4	Rp 195.177.760	Setda (Bagian PBJ)	Ketua Tim LPSE
					Meningkanya Kualitas Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Orang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	-	100	100	-	200	Rp 472.304.680	Setda (Bagian PBJ)	Ketua Tim Pembinaan dan Advokasi
					Meningkatnya Kualitas Tingkat Kematangan UKPBJ	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1	1	1	1	4	Rp 189.644.590	Setda (Bagian PBJ)	Ketua Tim Pengelola Pengadaan

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
11	Indeks Sistem Merit	4	359,5	364,90	Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan kebutuhan ASN melalui berbagai jalur pengadaan	Dokumen	Jumlah Dokumen kegiatan pemenuhan kebutuhan ASN melalui berbagai jalur pengadnan	1	1	1	1	4	Rp 1.433.687.032	BKPSDM	BKPSDM
					Tersedianya Layanan Assessment Centre	Orang	Jumlah ASN yang terlayani assessment centre	33	150	117	850	1150	Rp 259.392.570	BKPSDM	BKPSDM
					Penyusunan talent pool untuk setiap Jenjang Jabatan	Dokumen	Tersusunnya dokumen talent pool untuk setiap Jenjang Jabatan	-	-	-	1	1	Rp 10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
					Penyusunan Kelompok Rencana Suksesi untuk setiap jenjang Jabatan	Dokumen	Tersusunnya dokumen Kelompok Rencana Suksesi untuk setiap Jenjang Jabatan	-	-	1	-	1	Rp 30.000.000	BKPSDM	BKPSDM
					Tersosalisasikannya Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepada Seluruh ASN Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan Permenpan-	60	-	-	-	60	Rp 1.500.000	Seluruh Perangkat Daerah	BKPSDM

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
							rb nomor 6 tahun 2022								
					Asistensi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilaksanakan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	Kegiatan	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan permenpan rb nomor 6 tahun 2022	1	-	-	-	1	Rp 48.620.000	BKPSDM	BKPSDM
12	Indeks Pelayanan Publik	2	4,68	4,70	1. Sosialisasi 2. Asistensi 3.Monev 4. konsultasi	Laporan	IPP	-	1	-	1	2	Rp 70.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Ketua Tim KTL
13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	93	93	1. Sosialisasi 2. Asistensi 3.Monev 4. konsultasi	Laporan	Indek Kepatuhan	-	1	-	1	2	Rp 70.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Ketua Tim KTL
14	Indeks SPBE	9	4,59	4,62	Penyusunan Laporan Triwulanan Progres SPBE	Dokumen	Tersedianya Monev Triwulanan	1	1	1	1	4	Rp 100.000.000	Diskominfo	Bidang Perencanaan TIK

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
15	Opini BPK	5	2	wtp	Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD	-	-	50	50	100	Rp 638.192.389	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD Perubahan	-	-	50	50	100	Rp 553.967.133	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase rata-rata kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran (sesuai kewenangan BKAD)	-	-	80	-	80	Rp 371.761.530	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	Rp 1.464.469.613	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai SAP dan disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	Rp 921.781.133	BKAD	BKAD

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Bidang	Bidang tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	50	150	200	350	750	Rp 7.479.839.530	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Bidang	Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik	35	40	35	45	155	Rp 1.481.718.212	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase Laporan BMD disusun tepat waktu sesuai ketentuan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemkot Bandung	100	-	100	-	100	Rp 1.635.148.465	BKAD	BKAD
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	Persentase Pencapaian realisasi pendapatan dari pemanfaatan Tanah Milik Daerah sebagaimana target yang ditetapkan pada APBD	20	40	70	100	100	Rp 2.172.283.698	BKAD	BKAD

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
16	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	84,92	85	Melakukan pendampingan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Perangkat Daerah dalam TLHP BPK RI	-	-	-	1	1	Rp 141.600.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
					Melakukan monitoring progres tindaklanjut melalui kegiatan pemutakhiran progres TLHP BPK sekaligus penginputan data melalui Aplikasi BPK RI;	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemutakhiran TLHP BPK	-	-	-	1	1	Rp 74.880.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
17	Indeks BerAkhlak	4	82,9	83,50	Pelatihan/ seminar/ workshop terkait BerAKHLAK	Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Pelatihan/seminar/ workshop terkait BerAKHLAK untuk seluruh Perangkat Daerah	-	-	63	-	63	Rp 5.000.000	ASN Kota Bandung	BKPSDM
18	Survei Penilaian Integritas	10	69,14	70,14	Menindaklanjuti Rekomendasi SPI 2024, dengan: a. Menyusun Tindak Lanjut SPI 2024 b. Menyusun Laporan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil SPI 2024	Dokumen	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut SPI 2024	-	-	-	1	1	Rp 12.744.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	Target					Anggaran	Pelaksana	Koordinator
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
					Melaksanakan Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan SPI 2025, dengan: a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data populasi SPI 2025; b. Melaksanakan Pendampingan Area Pencegahan Korupsi dan Survei Penilaian Integritas 2025	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan SPI 2025	-	-	-	1	1	Rp 94.496.000	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
19	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,28	88,28	1. Sosialisasi 2. Asistensi 3. Monev 4. konsultasi	Laporan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	1	-	1	2	Rp 70.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Ketua Tim KTL
20	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	3	3	Penyusunan Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA)	Dokumen	Tersedianya Arsitektur Tobe dan peta Rencana	-	-	1	-	1	Rp 50.000.000	Diskominfo	Bidang Perencanaan TIK

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002